

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN UMKM KOTA SURABAYA

Anggi Prikustiawan<sup>1)</sup>, Priyanto<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: anggy.prikustiawan5@gmail.com

### ABSTRAK

Untuk mewujudkan peningkatan penjualan UMKM melalui pengadaan barang atau jasa dilakukan inovasi E-Katalog Lokal seperti E-Peken pada Pemerintah Kota Surabaya untuk memudahkan proses penjualan dan transaksi barang atau jasa UMKM. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, menganalisis hasil implementasi kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, dan menganalisis dampak positif serta dampak negatif pelaksanaan kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah pengusaha UMKM di Kota Surabaya sebanyak 5 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan kebijakan E-Katalog lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM secara keseluruhan telah memenuhi faktor implementasi kebijakan publik. Hasil implementasi kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM telah memenuhi indikator implementasi kebijakan publik dengan hasil adanya 15.081 transaksi Peken dengan total transaksi sebanyak Rp. 7,5 miliar pada bulan September 2022. Kemudian terdapat beberapa dampak positif dari pelaksanaan kebijakan E-Katalog Lokal yaitu: (1) Membantu dalam menghemat anggaran, karena adanya admin yang cukup membuat lebih efisien; (2) Proses pengadaan melalui E-Katalog menjadi lebih cepat; (3) Mendapatkan informasi tentang pengadaan melalui E-Katalog dengan lebih mudah; (4) Memperoleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengadaan melalui E-Katalog; (5) Pengadaan melalui E-Katalog berkontribusi pada daya tahan organisasi UMKM; serta (6) Pengadaan melalui E-Katalog membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan UMKM.

**Kata Kunci:** E-Katalog, Pengadaan Barang atau Jasa, UMKM

### Abstract

*To realize increased sales of MSMEs through the procurement of goods or services, Local E-Catalog innovations such as E-Peken have been implemented by the Surabaya City Government to facilitate the process of selling and transactions for MSME goods or services. The aim of the research is to analyze the Local E-Catalog policy in the process of procuring goods or services from the Surabaya City Government for MSMEs, analyze the results of implementing the Local E-Catalog policy in the process of procuring goods or services from the Surabaya City Government for MSMEs, and analyze the positive and negative impacts of policy implementation. Local E-Catalog in the process of procuring goods or services from the Surabaya City Government for MSMEs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research subjects were 5 MSME entrepreneurs in the city of Surabaya. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method. The research results prove that the local E-Catalog policy in the process of procuring goods or services from the Surabaya City Government for MSMEs as a whole has fulfilled the implementation factors of public policy. The results of implementing the Local E-Catalog policy in the process of procuring goods or services from the Surabaya City Government for MSMEs have met the indicators for implementing public policy with the result of 15,081 Peken transactions with a total transaction of Rp. 7.5 billion in September 2022. Then there are several positive impacts from implementing the Local E-Catalog policy, namely: (1) Helping to save budget, because there is sufficient admin to make it more efficient; (2) The procurement*

*process via E-Catalog is faster; (3) Obtain information about procurement via E-Catalog more easily; (4) Obtaining a socialization program carried out by the government regarding procurement through E-Catalog; (5) Procurement through E-Catalog contributes to the resilience of MSME organizations; and (6) Procurement through E-Catalog helps increase the stability and growth of MSMEs.*

**Keywords:** *E-Catalog, Procurement of Goods or Services, MSMEs*

## A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan negara salah satunya dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan pemerintah di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada tahun 2022, Pemkot Surabaya mengoptimalkan produk lokal unggulan dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Selain untuk menjalankan Tema APBD 2022 yaitu pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural, kegiatan itu juga memberikan perhatian lebih untuk pelaku UMKM sebagai ujung tombak upaya pemulihan.

Dalam INPRES Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan mengenai penerapan Katalog Elektronik sebagai strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2018). Inovasi aplikasi E-Peken yang merupakan hasil modifikasi dari aplikasi E-Lokal Market yang merupakan aplikasi berisi katalog seluruh produk UMKM Kota Surabaya (Akbari & Prathama, 2023).

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Surabaya diketahui pada bulan September 2022 telah terjadi 15.081 transaksi Peken dengan total transaksi sebanyak Rp. 7,5 miliar. Proses implementasi E-Peken diawali dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggunakan E-Peken. Walaupun E-Katalog Lokal dapat meningkatkan penjualan UMKM terdapat beberapa permasalahan terkait penggiat

UMKM dalam mengakses e-peken. Maka, masih sangat perlu pengamatan akan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sesudah adanya aplikasi mobile untuk para penggiat UMKM serta pengembangan e-peken perlu ditingkatkan demi kenyamanan penggiat usaha dan para konsumen globalisasi, persaingan dunia bisnis yang semakin ketat (Alysia, 2021).

Berdasarkan permasalahan dalam penerapan E-Katalog Lokal, peneliti akan melakukan penelitian untuk menganalisis kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, menganalisis hasil implementasi kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, dan menganalisis dampak positif serta dampak negatif pelaksanaan kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM.

Keterbaruan penelitian terletak pada analisis E-Katalog Lokal yang berfokus pada E-Peken yang diimplementasikan pada Pemerintahan Kota Surabaya. Alasan penelitian ini dikarenakan peran E-Katalog lokal yang menjadi salah satu factor penting peningkatan penjualan UMKM serta menjadi sarana implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian

kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Friedrich mengatakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2012). Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itulah yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik yang kemudian membuahkan hasil yang disebut Kebijakan. Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan pemerintahan publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

## 2. Indikator Analisis Kebijakan Publik

Penelitian Gibson (2005); Ariesta (2021) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik yang diterapkan. Berikut indikator dari analisis kebijakan publik sesuai teori Gibson (2005); Ariesta (2021) yaitu:

### a) Produksi

Adalah suatu kegiatan yang dapat menciptakan guna baik waktu, bentuk maupun tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (Wasi, 2017). Dalam indikator ini mengacu pada sub indikator jumlah pengadaan dan kualitas dari

produk baik barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.

### b) Efisiensi

Adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankan yang diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan (Pratiwi, 2019). Indikator ini mengacu pada sub indikator anggaran dan waktu dimana suatu kebijakan dapat berjalan efisien apabila dilakukan dengan anggaran yang minimal dengan waktu yang cepat namun menghasilkan produk yang berkualitas dan banyak.

### c) Kepuasan

Adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka (Kotler & Keller, 2016). Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. Indikator ini mengacu pada sub indikator sub indikator transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi dan akuntabilitas dari produk baik yang ditawarkan barang ataupun jasa maka akan menimbulkan kepuasan dari pelanggan.

### d) Adaptasi

Adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri (Ling, 2017). Indikator ini mengacu pada sub indikator sosialisasi dan perubahan regulasi. Ketika terjadi perubahan lingkungan maka kebijakan harus melakukan penyesuaian akan kondisi lingkungan yang ada sehingga implementasi kebijakan dapat diterapkan secara maksimal.

### e) Pengembangan

Adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,

teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator ini mengacu pada sub indikator daya tahan organisasi dan penyesuaian organisasi.

### C. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan mengupas suatu masalah pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Sugiyono, 2017). Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung sehingga didapatkan jumlah sampel yakni pengusaha UMKM di Kota Surabaya sebanyak 5 orang.

Metode pengumpulan data penelitian melalui observasi partisipatif terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan Katalog Elektronik Lokal berdasarkan pendapat/persepsi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai INPRES Nomor 2 Tahun 2022, wawancara mengenai permasalahan yang harus diteliti dan dokumentasi berupa pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Teknik analisis data penelitian melalui analisis interaktif berdasarkan teori Gibson et al (2005) yang meliputi beberapa dimensi untuk menganalisis kebijakan pengadaan barang dengan E-Katalog yaitu dimensi produksi, dimensi efisiensi, dimensi kepuasan, dimensi adaptasi, dan dimensi pengembangan

### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 1. Analisis Kebijakan E-Katalog Lokal Dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kota Surabaya Bagi UMKM

Kebijakan penggunaan E-Peken (Pemberdayaan Ekonomi Lan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo) di Kota Surabaya

dirancang dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 71 Huruf F yang memberikan kemudahan dalam pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online. Penggunaan E-Peken disahkan melalui Keputusan Walikota Nomor 188.45/427/436/1/2/2021 Tentang Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya, 2021 sehingga kebijakan E-Peken telah didasari oleh peraturan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses implementasi E-Peken dilakukan dengan mendorong dan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli kebutuhan hidup melalui Aplikasi E-Peken didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, aplikasi E-Peken mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM dalam pemahaman media digital sehingga mendorong pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Inovasi Aplikasi E-Peken memiliki minimum pembelian yang telah ditetapkan tiap bulan berdasarkan pangkat dan golongan pegawai ASN.

Hasil yang dicapai dari proses implementasi E-Peken ini adalah adanya peningkatan penjualan dan pendapatan dari pelaku UMKM. Menurut Akbhari & Prathama (2023), belanja yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditunjang dengan pengadaan barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Inovasi



Aplikasi E-Peken telah mencapai 1,2 Triliun dan ditujukan sepenuhnya untuk membantu UMKM Kota Surabaya, sehingga anggaran APBD yang juga berasal dari pajak masyarakat Kota Surabaya dapat kembali lagi untuk mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya khususnya pelaku UMKM.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan E-Peken di Kota Surabaya dilakukan pembahasan indikator menurut Ariesta (2021) yaitu:

a) Produksi

Hasil wawancara menyatakan jumlah pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan melalui e-katalog lokal Pemerintah Kota Surabaya bervariasi pada masing-masing UMKM. Kemudian Pertanyaan terkait kualitas menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM menilai kualitas barang/jasa yang diperoleh melalui pengadaan melalui e-katalog cukup bagus walaupun terdapat masalah tidak adanya notifikasi ketika ada order masuk.

b) Efisiensi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengadaan melalui e-katalog mempengaruhi anggaran UMKM namun tidak signifikan. Hasil wawancara menyatakan bahwa pengadaan melalui e-katalog memberikan pengaruh anggaran UMKM, namun hanya diawal saja, sedangkan selanjutnya hingga saat ini biasa saja dan cenderung mendapatkan sedikit orderan. Akan tetapi, dengan adanya pengadaan melalui e-katalog dapat membantu dalam menghemat anggaran. Dari sisi waktu, sebagian besar UMKM menilai kecepatan proses pengadaan melalui e-katalog adalah cukup cepat walaupun terdapat kendala pada proses login di e-katalog yang tidak bisa lebih dari 1 handphone.

c) Kepuasan

Hasil wawancara menunjukkan proses pengadaan melalui e-katalog transparan dengan hasil laporan pembelian yang langsung masuk pada

rekening serta dapat dipertanggungjawabkan.

d) Adaptasi

Hasil wawancara menyatakan pelaku UMKM mendapatkan informasi tentang pengadaan melalui e-katalog melalui Dinas melalui sosialisasi.

e) Pengembangan

Hasil wawancara menyatakan pengadaan melalui e-katalog cukup membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan UMKM dan UMKM tidak harus melakukan penyesuaian atau perubahan dalam organisasi UMKM sebagai akibat dari pengadaan melalui e-katalog. Namun masih terdapat kendala dikarenakan tidak ada dukungan dari pemerintah dalam melakukan penyesuaian organisasi.

## **2. Hasil Implementasi Kebijakan E-Katalog Lokal Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surabaya Bagi UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan E-Katalog Lokal yakni E-Peken pada proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data Pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan pada bulan September 2022 telah terjadi 15.081 transaksi Peken dengan total transaksi sebanyak Rp. 7,5 miliar. E-Peken memiliki potensi belanja kebutuhan pokok dari 12 ribu ASN senilai Rp. 144 miliar sedangkan Potensi Belanja APBD 2022 kepada UMKM dari SKPD sebanyak Rp. 110 miliar.

Proses implementasi E-Peken dilakukan dengan mendorong dan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli kebutuhan hidup melalui Aplikasi E-Peken didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

### 3. Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Kebijakan E-Katalog Lokal Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surabaya Bagi UMKM

Dilihat dari temuan pada hasil wawancara terlihat adanya beberapa dampak positif dari pelaksanaan kebijakan E-Peken dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, yaitu:

- a) Dengan adanya pengadaan melalui e-katalog dapat membantu dalam menghemat anggaran, karena adanya admin yang cukup membuat lebih efisien.
- b) Proses pengadaan melalui e-katalog menjadi lebih cepat.
- c) Mendapatkan informasi tentang pengadaan melalui e-katalog dengan lebih mudah.
- d) Memperoleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengadaan melalui e-katalog.
- e) Pengadaan melalui e-katalog berkontribusi pada daya tahan organisasi UMKM.
- f) Pengadaan melalui e-katalog membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan UMKM.

Sedangkan untuk dampak negative belum ditemukan dari pelaksanaan kebijakan e-katalog lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisis kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah Kebijakan E-Katalog lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota

Surabaya bagi UMKM yang ditinjau dari faktor Produksi dimana jumlah pengadaan barang/jasa melalui e-peken bervariasi pada masing-masing UMKM dengan kualitas pelayanan yang dinilai cukup baik walaupun memiliki kekurangan dari tidak adanya notifikasi langsung dari aplikasi dan sering terjadi trouble.

Hasil implementasi kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM telah memenuhi indikator implementasi kebijakan publik dengan hasil adanya 15.081 transaksi Peken dengan total transaksi sebanyak Rp. 7,5 miliar pada bulan September 2022. Terdapat beberapa dampak positif dari pelaksanaan kebijakan e-katalog lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, yaitu:

- a) Dengan adanya pengadaan melalui e-katalog dapat membantu dalam menghemat anggaran.
- b) Proses pengadaan melalui e-katalog menjadi lebih cepat.
- c) Mendapatkan informasi tentang pengadaan melalui e-katalog dengan lebih mudah.
- d) Memperoleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengadaan melalui e-katalog.
- e) Pengadaan melalui e-katalog berkontribusi pada daya tahan organisasi UMKM dan Pengadaan melalui e-katalog membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan UMKM.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan secara keseluruhan terkait analisis kebijakan dalam penerapan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal pemerintah kota surabaya untuk pengembangan UMKM, sehingga peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

- a) Diharapkan agar pemerintah kota Surabaya dapat meningkatkan implementasi kebijakan e-peken seperti

- tidak adanya notifikasi langsung dari aplikasi dan sering terjadi trouble serta ongkos kirim yang tidak otomatis, kendala pada proses login di e-katalog yang tidak bisa lebih dari 1 handphone dan tidak ada dukungan dari pemerintah dalam melakukan penyesuaian organisasi.
- b) Diharapkan pemerintah kota Surabaya dapat membantu peningkatan order pelaku UMKM dengan adanya wadah untuk promosi gratis secara online.
  - c) Diharapkan agar pemerintah kota Surabaya dapat terus meninjau dan mengevaluasi program kebijakan e-katalog lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya agar kelemahan dan kekurangan dapat teratasi dengan baik.
  - d) Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil dalam penelitian ini dengan menggunakan indicator lainnya dalam menilai kebijakan publik.
  - e) Implikasi penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan aktivitas pengadaan barang/jasa oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat meningkatkan penjualan UMKM di Kota Surabaya.
  - f) Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan wawasan keilmuan, khususnya dalam kebijakan publik dan ilmu pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui Katalog Elektronik Lokal bagi UMKM. Sedangkan Keterbatasan penelitian terdapat pada jumlah responden yang hanya berjumlah 5 orang pengusaha UMKM sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

## REFERENSI

- Akbhari, I., & Prathama, A. (2023). Inovasi Aplikasi E-Peken: Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 396–409.
- Alysia. (2021). Kajian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui E-Peken dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya: Pertumbuhan Ekonomi melalui UMKM Berbasis Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 10–18.
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Ascarya*, 1(2), 156–165.
- Gibson, L., I., M., J., & Donnelly, J. H. (2005). *Organization Perilaku dan Struktur*. Binarupa Aksara.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. (2022). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Pemerintah Indonesia.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson Prentice Hall.
- Inc. Ling, Y. L. (2017). Adaptasi Keluarga terhadap Beban Peran Publik dan Peran Domestik Ibu yang Menyusui di Kota Waikabubak, Sumba. *Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2018. (2018). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik. Pemerintah Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan

- Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah Indonesia.
- Pratiwi, E. J. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. UIN SMH Banten.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasi, A. (2017). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Produsen Tempe Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (1st ed.)*. CAPS.